

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU No. 18  
Tahun 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO**

**OLEH**

**RAHMAT HIDAYAT NGURAWAN**

**NIM: 221 411 079**

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji

Hari/ Tanggal : Kamis / 21 January 2016

Waktu : 12.00 am

**PENGUJI**

1. Dr. Jusdin Puluhulawa M.Si

1. \_\_\_\_\_

2. Dr. Udin Hamim S.Pd SH M.Si

2. \_\_\_\_\_

3. Dr. Sastro M. Wantu SH, MSi

3. \_\_\_\_\_

4. Hj. Maisara Sunge SH, MH

4. \_\_\_\_\_

Gorontalo, 21 Januari 2016

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**Dr. Sastro M. Wantu SH, MSi**  
NIP: 19960903 199603 1 001

## **ABSTRAK**

**Rahmat Hidayat Ngurawan.** 221 411 079. 2016 “Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo” Pembimbing I Dr. Sastro M. Wantu, SH. M.si dan Pembimbing II Hj. Maisara Sunge SH. MH. Skripsi. Gorontalo. Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

Masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sampah yang ada di Kota Gorontalo di tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 pasal 6 dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak adanya aturan turunan/perda tentang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Situs atau informasi dalam penelitian ini yaitu, Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Teknik penelitian yang digunakan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data digunakan untuk mengolah hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo belum seutuhnya bisa menjalankan apa yang telah di amanatkan pada Pasal 6 UU No 18 Tahun 2008. Hal ini terjadi diantaranya karena kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun TPS dan TPA, serta kurangnya anggaran yang di sediakan untuk mengelola sampah di Kota Gorontalo. Hal selanjutnya yang menjadi kendala adalah tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, menjadi hal yang sulit untuk menerapkan kebijakan kepada masyarakat terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah, Implementasi UU No 18 Tahun 2008, Pengelolaan Sampah**